

Handout: **KOMUNIKASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN (KSP)**
ANALISIS REVOLUSI PARADIGMA PEMBANGUNAN DI INDONESIA ¹

*Oleh: Kamaruddin Hasan*²

Paradigma pembangunan, khususnya politik dan ekonomi, harus diubah, dari menyerahkan ekonomi kepada mekanisme pasar menjadi menegakkan nilai nasionalisme. Pasalnya, dengan menganut sistem pasar yang bertumpu pada kapitalisme, Indonesia telah terbukti gagal dan bangkrut. Hal itu dikatakan sejumlah pengamat politik dan ekonomi dalam "Diskusi Chat After Lunch" di Jakarta. Hadir sebagai narasumber di antaranya pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), Syamsul Hadi, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dan Guru Besar Ekonomi UI Suahasil Nazara.

Syamsul Hadi menyatakan selama ini Indonesia menganut sistem ekonomi pasar, dan hal itu terbukti gagal. Karena itu, pemerintah harus berani meninggalkan sistem itu, dan selanjutnya beralih ke sistem yang menegakkan nilai nasionalisme dalam praktik pembangunan ekonomi. Negara-negara lain, kata dia, telah mulai mencoba beralih ke sistem lain, ia mengambil contoh Barack Obama (Presiden Amerika Serikat) yang pemerintahannya mulai meninggalkan ekonomi liberal. Obama mulai melakukan gerakan nasionalisme ekonomi.

"Obama melakukan gerakan cinta produk AS. Proyek-proyek besar di AS diharuskan menggunakan komponen-komponen asli dalam negeri (AS)". Hal sama dilakukan Jepang. Perdana Menteri Jepang M Yukio Hatoyama mengeluarkan kebijakan yang pro pertanian dalam negeri. Kebijakan itu adalah bagian dari program pro kesejahteraan dalam negeri. Bahkan saking pronya, jika ada petani yang rugi, pemerintah akan menggantinya. "Jepang juga menerapkan tarif bea masuk untuk beras nyaris mencapai 300 persen karena ingin melindungi petaninya. Thailand juga 60 persen. Indonesia hanya 30 persen. Maka tak heran jika petani me-gap-megap," .

Dijadikan Dogma

Rizal Ramli mengatakan sistem mekanisme pasar di Indonesia seakan-akan dijadikan dogma seperti agama. Padahal negara yang berhasil memperbaiki ketertinggalannya tidak bisa sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Jika sistem ekonomi liberal tersebut tetap dilanjutkan, dikhawatirkan Indonesia hanya akan menjadi sumber bahan mentah bangsa Eropa dan menjadi pasar untuk barang-barang dari luar. "Kita hanya unggul sebagai penyedia bahan mentah dari sumber daya alam, tapi tidak punya industri,". Agar dalam menghadapi era pasar bebas nanti, pemerintah harus bisa mendorong terbangunnya masyarakat berproduksi, bukan masyarakat yang berdagang. Tidak boleh lagi ada ekspor barang mentah. Indonesia harus mampu menghasilkan barang jadi yang berkualitas dan berdaya saing. Harus dipetakan pula apa keunggulan produksi dalam negeri. Banyak PR yang harus dikerjakan, misalnya infrastruktur, regulasi, pajak, dan keberpihakan perbankan pada sektor riil dalam negeri.

¹ Diambil dari berbagai sumber

² Dosen prodi ilmu komunikasi Fisip Unimal

Pada tanggal 14 Januari 2010 yang telah diluncurkan buku Pengalaman Pembangunan Indonesia. Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro di Jakarta. Widjojo Nitisastro adalah tokoh ekonomi yang menjadi arsitek perubahan paradigma sistem perekonomian Indonesia pada pertengahan 1960an. Menarik untuk sedikit menyimak apa yang terjadi pada saat itu. Paradigma pembangunan selalu dan harus berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan tuntutan jaman dan permasalahan. Terjadinya krisis yang besar sering dan memaksakan munculnya paradigma baru. Tanpa paradigma baru, krisis yang sama dan lebih besar akan terjadi lagi.

Demikian juga dalam pemikiran ekonomi. Di tahun 1930-an J. M. Keynes telah melakukan revolusi dalam paradigma pemikiran ekonomi. Revolusi pemikirannya, setelah dikuantifikasikan oleh Samuelson dan kawan kawan, kemudian menjadi terkenal dengan yang disebut Teori Ekonomi Makro, yang kini diajarkan di seluruh dunia. Pada saat itu sedang terjadi krisis ekonomi yang amat besar, yang sering disebut dengan Great Depression. Negara kaya seperti Amerika Serikat dan Eropa terjerembab dalam kesulitan ekonomi yang besar. Saat itu paradigmanya adalah peran pemerintah yang sekecil kecilnya. Saat itu, para ekonom mempercayakan kegiatan ekonomi sepenuhnya pada kekuatan pasar. Ekonomi yang menurun, menurut paradigma saat itu, akan pulih dengan sendirinya. Ekonomi yang memanas akan dengan sendirinya kembali normal, asalkan pemerintah tidak ikut campur tangan. Namun, di tahun 1930-an itu, ekonomi yang terus menurun tidak kunjung baik, dan bahkan dari masa ke masa, keadaan ekonomi makin parah.

Di saat seperti itu lah muncul J. M Keynes, yang memperkenalkan paradigma baru, bahwa pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi krisis saat itu. Pemerintah harus menciptakan permintaan, harus mengeluarkan uang, agar ekonomi tumbuh lagi. Di jaman sekarang, pemikiran ini dikenal dengan istilah stimulus package. Namun, usaha J. M Keynes ini tidak begitu saja diimplementasikan. Dukungan kuat dari tokoh politik sangat perlu untuk mengimplementasikan perubahan paradigma pemikiran. Baru dengan dukungan penuh dari Franklin D. Roosevelt, presiden Amerika Serikat waktu itu, pemikiran Keynes dijalankan. Dan sejak saat itu, ekonomi Amerika Serikat dan dunia, segera mengalami pemulihan. Ekonomi dunia kemudian mengikuti paradigma pasar dengan campur tangan pemerintah.

Namun, tidak semua negara mengikuti paradigma pasar dengan campur tangan pemerintah. Negara yang menganut sistem sosialis/ komunis cenderung tidak mempercayai penggunaan mekanisme pasar sama sekali. Mereka percaya bahwa semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Contoh paling jelas adalah apa yang dilakukan oleh Uni Soviet (sebelum pecah menjadi banyak negara). Pusat lah yang menentukan semua kegiatan ekonomi sampai pada unit mikro yang terkencil. Harga tidak berperan dalam mengalokasi barang dan jasa.

Indonesia sebelum tahun 1966 juga cenderung menggunakan sistim perencanaan terpusat, yang mengabaikan mekanisme pasar. Ditambah dengan situasi "perang" melawan Amerika Serikat, Inggris, dan negara tetangga (Malaysia dan Singapura), situasi ekonomi di awal 1960s sangat kacau. Telah terjadi hiperinflasi, kenaikan harga yang amat cepat. Rata-rata harga di Desember 1965 tujuh

kali lipat rata rata harga di Desember 1964. Bayangkan. Pada bulan Desember 1964, sejumlah uang dapat menghidupi suami istri dengan lima orang anak. Namun, dengan harga yang menjadi tujuh kali lipat, uang yang sama itu hanya dapat membiayai satu anggota keluarga.

Di saat itu lah muncul paradigma baru untuk perekonomian Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1963, Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dalam pengukuhanannya sebagai guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menyampaikan pidato yang berjudul "Analisa Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan". Kalau di saat ini mahasiswa ekonomi Fakultas Ekonomi UI membaca pidato ini, mungkin mereka akan merasa bahwa yang disampaikan oleh Widjojo Nitisastro tidak hebat, biasa biasa saja. Mereka semua, para mahasiswa itu, tentu sudah amat faham dengan yang disampaikan dalam pidato itu. Namun, kita perlu melihat situasi yang terjadi di awal tahun 1960-an. Widjojo Nitisastro dan kawan kawan di Fakultas Ekonomi UI menghadapi situasi yang jauh berbeda dengan saat ini. Kekuasaan politik saat itu sangat curiga pada Amerika Serikat, sementara Widjojo dan kawan kawan menyelesaikan studinya di Amerika Serikat. Lebih lanjut, Widjojo menyarankan perubahan paradigma. Di jaman itu politik adalah panglima. Sukarno, presiden Indonesia waktu itu, tidak menghargai analisis ekonomi. Dalam suasana seperti itulah, dalam pidatonya, Widjojo Nitisastro menyarankan pentingnya analisis ekonomi untuk Indonesia. Lebih lanjut, Widjojo Nitisastro memperkenalkan penggunaan mekanisme pasar dalam kebijakan pembangunan Indonesia. Ia tidak menyerahkan kepada pasar sepenuhnya, tetapi bagaimana mengkombinasikan perencanaan dari pemerintah pusat dan kekuatan pasar.

Pada saat sekarang ini, tentu saja, analisis ekonomi dan penggunaan pasar sudah menjadi barang tiap hari, dan bukan barang baru lagi untuk Indonesia. Namun, saat itu, memperkenalkan analisis ekonomi dan penggunaan pasar merupakan tabu politik. Kalau Keynes memperkenalkan peran serta pemerintah kepada dunia yang percaya sepenuhnya ke pasar pada tahun 1930-an, Widjojo memperkenalkan sistem pasar pada perencanaan pembangunan. Keduanya melakukan kombinasi pasar dan campur tangan pemerintah. Widjojo Nitisastro boleh dikatakan sebagai seorang Keynesian, pengikut pemikiran Keynes. Seperti halnya dengan J. M. Keynes, ide Widjojo Nitisastro juga sulit diterapkan karena pada saat itu tak ada dukungan dari elit politik. Bukan hanya tak ada dukungan, bahkan, saat itu, elit politik memusuhi Widjojo Nitisastro dan ide idenya. Baru kemudian, setelah terjadi perubahan politik, dari Sukarno ke Suharto, ide perubahan paradigma tersebut mendapat dukungan politik. Suharto mendukung penuh ide Widjojo Nitisastro. Bahkan, akhirnya, sebagian besar Ketetapan MPRS Nomor XXIII/ 1966 yang kemudian menjadi landasan hukum pembangunan ekonomi Indonesia di awal Order Baru, berasal dari ide Widjojo Nitisastro dan kawan kawan di Fakultas Ekonomi UI. Tentu saja, di jaman sekarang, pemikiran tersebut bukanlah hal yang luar biasa, seperti juga bahwa pemikiran Keynes sudah menjadi hal yang sehari hari bagi para ekonom dan mahasiswa ekonomi.

Kemampuan dan keberanian Widjojo Nitisastro untuk memulai sesuatu yang baru tidak bermula di tahun 60-an. Dalam penulisan disertasinya, Widjojo Nitisastro juga melakukan sesuatu yang waktu itu masih amat langka.

Disertasinya (tahun 1961) berjudul "Migration, Population Growth, and Economic Development: a Study of the Economic Consequences of Alternative Pattern of Inter-island Migration". Selain disertasi, studi Widjojo Nitisastro mengenai demografi juga menghasilkan buku Population Trends in Indonesia, yang kemudian menjadi amat terkenal dalam kepustakaan demografi di Indonesia.

Di jaman sekarang, mahasiswa demografi akan merasakan bahwa kedua karya ini sebagai "biasa biasa" saja, karena mereka, saat ini, telah sangat terbiasa dengan apa yang dilakukan Widjojo Nitisastro dalam dua buku tersebut. Namun, saat itu, di akhir 1950-an dan awal 1960-an, data demografi teramat langka, terutama untuk Indonesia. Widjojo memasuki hutan demografi tanpa angka, dan ia mulai merintis mengumpulkan dan menghasilkan angka.

Kemudian, setelah Widjojo Nitisastro menjadi Ketua Tim Bidang Ekonomi dan Keuangan dari Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet Republik Indonesia, di era politik di bawah Suharto, pada tahun 1996, hasil karya demografi tersebut dikembangkan oleh Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi UI, yang didirikan antara lain oleh Widjojo Nitisastro. Kemudian, data demografi tersebut menjadi dasar yang amat penting dalam perencanaan pembangunan Indonesia.

Jaman sekarang, situasi, permasalahan, dan tantangan sudah jauh berbeda dengan apa yang terjadi di jaman J. M. Keynes, tahun 1930-an, dan jaman Widjojo Nitisastro, tahun 1960-an. Namun, satu hal yang masih relevan: perubahan paradigma selalu diperlukan, untuk menghadapi situasi, permasalahan, dan tantangan yang berbeda, terutama di saat krisis. Berbagai krisis yang melanda dunia, dan Indonesia, akhir akhir ini tampaknya juga memerlukan perubahan paradigma. Adakah paradigma baru dan apakah elit politik akan mendukung paradigma baru? Indonesia, sebagai anggota G-20, dapat memberikan sumbangan pemikiran perubahan paradigma pemikiran ekonomi untuk kepentingan global, termasuk Indonesia. Bedanya, kalau di jaman J. M Keynes dan Widjojo Nitisastro para ekonom dapat bekerja sendirian dalam pembuatan paradigma baru, di jaman sekarang, paradigma baru harus merupakan pemikiran yang inter-disiplin, yang harus melibatkan pemikiran di banyak disiplin ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu ekonomi.

Ilustrasi Paradigma Pembangunan di Indonesia

Apanya yang maju? Siapa yang maju? Kenapa disebut maju? Indonesia menggunakan variabel yang disebut *coincident economic index* (CEI), yang mengukur apa yang terjadi dengan perekonomian saat ini, saat variabel itu diukur. Variabel ini diukur antara lain dengan penjualan mobil dan konsumsi semen. Makin banyak penjualan mobil dan konsumsi semen, makin baiklah perekonomian kita. Sejak Februari 2009, indeks ini terus menguat, yang berarti perekonomian Indonesia terus membaik. "Mengapa penjualan mobil dan konsumsi semen merupakan indikator perbaikan ekonomi Indonesia?". "Sebab, selama ini terjadi korelasi kuat antara CEI dengan pertumbuhan produksi nasional, atau yang sering disebut juga dengan pertumbuhan pendapatan nasional." "Kalau pengukurnya antara lain penjualan mobil, berarti kemacetan lalu lintas menandakan kemajuan perekonomian?" Bu Oemi menyela lagi. "Betul Bu" jawab saya. "Lihat saja di banyak daerah dan di pedesaan. Orang akan

bangga kalau daerahnya makin ramai dengan kendaraan. Mereka tidak peduli dengan kepadatan kendaraan dan polusi udara serta suara bising karena kendaraan.” Bu Oemi sedih mendengar jawaban saya. “Anda tadi juga menyebutkan bahwa konsumsi semen termasuk salah satu indikator perbaikan ekonomi Indonesia?”

“Ya,Bu. Artinya, makin banyak gedung dibuat, makin banyak tanah tertutup semen, makin baiklah perekonomian kita.” “Jadi, banjir dan macet di Jakarta itu pertanda makin majunya perekonomian Jakarta?” tanya Bu Oemi “Ekonom kok aneh ya?” Itu belum terlalu aneh, saya melanjutkan, ada lagi variabel yang disebut *leading economic index* (LEI). Indeks ini untuk melihat apakah ekonomi akan maju dalam enam sampai 12 bulan ke depan. Salahsatu variabelnya adalah izin mendirikan bangunan. Makin banyak izin dikeluarkan untuk mendirikan bangunan, perekonomian diharapkan akan terus berkembang dalam 6–12 bulan ke depan. “Maka, Ibu jangan kaget kalau Jakarta terus-menerus banjir dan macet.” Terbayang, Bu Oemi ingin mendengar yang “lucu-lucu” lagi mengenai perekonomian Indonesia. Maka, saya ceritakan bahwa perekonomian Indonesia juga dikatakan sudah semakin maju kalau kita makin sering melihat turis asing di Indonesia. Kedatangan turis asing memang merupakan salah satu pengukur LEI. Meningkatnya jumlah turis dalam negeri tidak penting untuk perekonomian Indonesia. “Jadi, itu yang namanya kemajuan perekonomian Indonesia? Tetapi, apa arti pembangunan ekonomi? Bukankah pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan ekonomi? Ekonomi yang tumbuh pesat apakah berarti masyarakat tambah sejahtera?” Itu mungkin pertanyaan yang akan diajukan oleh Bu Oemi. Karena saya belum tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu, saya akan ceritakan ke Bu Oemi, bahwa perekonomian akan terus membaik bila masyarakat bertingkah laku yang boros. Bila masyarakat tidak suka menabung, tetapi suka pinjam, pinjam, dan pinjam; kemudian, belanja, belanja, dan belanja, maka perekonomian akan membaik.

Salah satu pengukur kemajuan perekonomian adalah indeks kepercayaan konsumen. Indeks ini makin tinggi bila konsumen optimistis. Konsumen yang optimistis artinya konsumen yang makin berani berbelanja. “Jadi, kita dianjurkan untuk boros?” sela Bu Oemi. Ekonom tak pernah bicara secara terang-terangan bahwa masyarakat harus boros. Tetapi, mereka akan senang bila masyarakat banyak berbelanja. Apalagi, di Indonesia, konsumsi rumah tangga menunjang kira-kira 60% pendapatan nasional. Coba lihat kebijakan pemerintah yang menurunkan suku bunga, atau membuat suku bunga tetap rendah. Tujuannya adalah agar orang lebih banyak meminjam. Suku bunga yang rendah sesungguhnya adalah hukuman untuk orang yang suka menabung, apalagi di tengah cepatnya kenaikan harga. “Bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Bagaimana dengan derajat kesehatan, tingkat pendidikan, kerusakan lingkungan, frustrasi karena macet, rasa aman, dan jaminan sosial termasuk jaminan hidup di masa tua?” terlintas Bu Oemi akan mengajukan pertanyaan ini. “Sebagian besar ekonom, termasuk yang di Indonesia, sudah sadar bahwa pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kami semua sudah belajar akan hal itu.

Tetapi, ketika tiba pada pengukuran pembangunan ekonomi, banyak di antara kami yang terjebak dengan konsentrasi pada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya,

muncul pengukuran dengan variabel yang lucu-lucu tadi, seperti penjualan mobil, penjualan semen, jumlah izin mendirikan bangunan, dan jumlah turis asing. Variabel itu dipilih semata karena variabel ini berkorelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Orientasinya memang pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif tidak dilihat sama sekali.” Saya lalu ingat pada pengajaran ilmu ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Pelajaran teori ekonomi mikro dimulai dengan kuliah bagaimana memaksimalkan kepuasan, yang sering disebut *utility*. Kemudian diperkenalkan pendapatan sebagai kendala utama meningkatkan kepuasan tersebut. Nah, para mahasiswa lalu belajar bahwa peningkatan pendapatan itu hal yang terpenting dalam perekonomian. Dalam teori ekonomi makro, mula-mula mahasiswa diajarkan bagaimana mengukur pendapatan nasional dengan segala kelemahannya sebagai indikator kesejahteraan. Namun, pelajaran selanjutnya tidak pernah lagi mengingat kelemahan tersebut. Semua diskusi terfokus pada bagaimana meningkatkan pendapatan nasional, tidak peduli pada dampak negatif dari proses peningkatan pendapatan nasional dan kelemahan pengukuran tersebut.

“Jadi, wajar bila sebagian ekonom terobsesi dengan pertumbuhan ekonomi. ” Saya merenung, saya belum tahu apa yang harus saya jawab kalau nanti saya benar-benar bertemu Bu Oemi, “Jadi, apa arti kemajuan perekonomian Indonesia?” ungguh menarik sekali tulisan pak Aris tentang arti kemajuan perekonomian Indonesia, kemajuan yang diukur dari kekayaan yaitu banyaknya mobil, rumah dan barang konsumsi yang dimiliki serta besarnya utility yang dicapai. saya ingin membandingkan dengan “kaya” menurut Islam. dalam Islam “kaya” iukur dari besartnya Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang ditunaikan. makin besar ZIS makin kaya rang tsb, karena dalam harta yang dimiliki sebagian adalah hak dari orang miskin. jadi walaupun kekayaannya ber-trilyun2 tapi jika dia tidak pernah menunaikan ZIS maka dia termasuk orang miskin yang terus berusaha untuk menambah hartanya. fenomena inilah yang terjadi saat ini orang makin konsumtif dan boros hanya untuk dikatakan kaya. banyak gedung dan rumah dibangun, mobil bertambah sehingga menambah masalah lingkungan. Apa arti kemajuan ekonomi apabila kemajuan tersebut hanya dinikmati sebegian kecil masyarakat Indonesia sehingga makin memperbesar kesenjangan yang ada.

=====